



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,  
Manajemen dan Akuntansi  
Vol. 7 No. 1, Maret 2021 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-6620**

**ANALISIS KINERJA PEMBANGUNAN DIMENSI INFRASTRUKTUR DAN  
PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Wahyunadi<sup>1)</sup>  
Mansur Afifi<sup>2)</sup>  
Muaidy Yasin<sup>3)</sup>**

**Universitas Mataram<sup>1), 2), & 3)</sup>**

<sup>1)</sup>**Email: [ghalibywahyu@gmail.com](mailto:ghalibywahyu@gmail.com)**

<sup>2)</sup>**Email: [mansurafifi@yahoo.com](mailto:mansurafifi@yahoo.com)**

<sup>3)</sup>**Email: [muaidyyasin@gmail.com](mailto:muaidyyasin@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*This research is entitled Performance Analysis of Infrastructure and Public Service Dimensions in West Nusa Tenggara Province. This research is a type of verification research, the data collection process is carried out by compiling a matrix of the required variables according to the analysis model. The results show that based on the available data, the results of the calculation of performance indicators for regency / municipal governments in the province of West Nusa Tenggara through the regional development index measurement model, that infrastructure development and macroeconomic development should have a reciprocal relationship, because infrastructure development leads to economic expansion through a multiplier effect. . Meanwhile, economic expansion creates the need to expand existing infrastructure, to absorb the increasing flow of goods and people circulating or circulating throughout the economy.*

*Keywords: Development Performance, Infrastructure and Public Service Dimensions*

**PENDAHULUAN**

Sebelum membahas mengenai kinerja pembangunan, kiranya penting untuk membahas konsep pembangunan karena dari konsep-konsep pembangunan tersebut selanjutnya dapat ditentukan aspek-aspek apa saja yang penting untuk diukur. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi,

pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000). Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata (Nugroho, 2004:67). Anonim (2007) juga menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan konsep tersebut, pembangunan dapat bermakna ganda yaitu: pertumbuhan yang terukur secara kuantitatif (pendapatan per kapita, konsumsi, jumlah rumah sakit, panjang jalan, dsb.) dan perubahan yang terukur secara kualitatif (sikap, kelembagaan, partisipasi, tata nilai).

Konsep pembangunan berkembang menjadi beberapa kajian dengan tema-tema tertentu seperti pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, pembangunan pertanian, pembangunan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. Beberapa kajian tersebut mencoba untuk menggali dan mengukur lebih dalam tentang pembangunan baik yang bersifat parsial (menekankan pada bidang pembangunan tertentu) maupun yang bersifat komprehensif (mencakup semua dimensi pembangunan). Terkait dengan konteks pembangunan regional, Ghalib (2005) mendefinisikan regionalisasi pembangunan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan sebagai usaha membagi wilayah nasional menjadi wilayah-wilayah regional (sub wilayah nasional), atau wilayah regional menjadi subregional. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan regional lebih dimaksudkan sebagai pembangunan daerah (provinsi/kabupaten).

Pembangunan nasional merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang meliputi usaha-usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingan, sehingga diperlukan skala prioritas pembangunannya, ada yang cukup dilaksanakan sekali saja dengan perawatan yang berlanjut, namun juga ada yang sifatnya dinamis dan berpeluang berkembang. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur

keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Dalam memenuhi penyediaan layanan publik kepada masyarakat pemerintah perlu memperhatikan aspek efisiensi yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya (keuangan daerah) yang dimilikinya secara akurat dan optimal. Proyek penyediaan fasilitas publik haruslah melalui sebuah kajian terkait analisis biaya-manfaat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan layanan publik dapat memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam membangun masing-masing daerahnya tentu berbeda-beda, mengingat potensi yang dimiliki tiap daerah berbeda-beda pula. Daerah yang memiliki potensi lebih besar cenderung memiliki pendapatan daerah yang besar pula, dan begitu sebaliknya. Begitu pula yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas layanan publik pada setiap daerah kabupaten/kota akan berbeda-beda pula baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan melakukan pengkajian terhadap kinerja pembangunan di daerah kabupaten/kota khususnya pada dimensi infrastruktur dan pelayanan publik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan adalah proses continue, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Sebagaimana dikemukakan oleh Soul M. Ketz, dalam bukunya *A. Sistem Approach to Development Administration*, yang dikutip Bintaro Tjokroamidjojo, bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu :

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (the best alternative) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik (the best combination)
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Diana Conyers dan Peten Hits (*An Introduction Development Planning in the Trird Woeld.*) menyatakan bahwa “Perencanaan adalah proses yang kontinyu, yang terdiri dari keputusan atau pillihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang, sehingga ia mendefinisikan perencanaan teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat”

Memperhatikan pendapat di atas dapat ditarik pengertian bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu rencana merupakan pemikiran-pemikiran kedepan secara matang yang mewujudkan pengambil keputusan sebagai persiapan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pencapaian tujuan tersebut dilakukan satu himpunan pengambilan keputusan. Dari definisi yang telah diberikan di atas terlihat adanya berbagai elemen dalam perencanaan yang perlu diuraikan lebih lanjut antara lain:

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya.
3. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran
4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, sehingga sangat berkaitan dengan masalah ketidak pastian implikasinya perencanaan sangat berkaitan dengan kegiatan

## 5. Perencanaan sebagai suatu proses

Selanjutnya konsep pembangunan berkembang menjadi beberapa kajian dengan tema-tema tertentu seperti pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, pembangunan pertanian, pembangunan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. Beberapa kajian tersebut mencoba untuk menggali dan mengukur lebih dalam tentang pembangunan baik yang bersifat parsial (menekankan pada bidang pembangunan tertentu) maupun yang bersifat komprehensif (mencakup semua dimensi pembangunan). Terkait dengan konteks pembangunan regional, Ghalib (2005) mendefinisikan regionalisasi pembangunan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan sebagai usaha membagi wilayah nasional menjadi wilayah-wilayah regional (sub wilayah nasional), atau wilayah regional menjadi subregional.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhandan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a) Permasalahan dan potensi yang ada
- b) Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai
- c) Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
- d) Penerjemahan rencana kedalam bentuk program yang nyata.
- e) Jangka waktu pencapaian tujuan

### **Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik**

Wujud pembangunan yang paling dapat dilihat secara langsung adalah perkembangan infrastruktur dan pelayanan publik. Sarana pendidikan dan kesehatan tentunya merupakan hal yang utama, mengingat hal tersebut berkaitan dengan pembangunan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan. Sarana lain yang vital bagi penduduk juga merupakan hal yang penting guna mendukung aktivitas penduduk.

Infrastruktur yang mendukung mobilitas penduduk adalah transportasi, dimana jalan menjadi sesuatu yang utama sebagai infrastruktur lalu lintas, demikian pula sarana lalu lintas keuangan yang mampu mengakomodir kebutuhan transaksi masyarakat. Listrik juga merupakan hal yang utama, tidak hanya berguna untuk penerangan saja,

namun berguna untuk segala aktivitas penduduk. Selain itu, sarana pertanian yang mendukung proses produksi tanaman pangan juga sangat diperlukan. Oleh sebab itu, dimensi infrastruktur dan pelayanan publik menjadi aspek tersendiri dalam penghitungan IPR. Dimensi infrastruktur dan pelayanan publik diwujudkan dalam 3 kelompok sub dimensi, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

Musgrave (1989), bahwa dampak utama yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah tercapainya efisiensi alokasi sumber daya yang semakin tinggi. Orientasi yang demikian akan membuka peluang terjadinya kompetisi antar daerah yang selanjutnya akan memacu efisiensi. Pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum terutama karena:

- i. pemerintah lokal lebih menghayati kebutuhan masyarakatnya;
- ii. keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
- iii. persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

### **Indikator dan Indeks Pembangunan**

Berbagai studi terkait dengan pengukuran kinerja pembangunan daerah menggunakan beberapa istilah yang berbeda. Beberapa istilah yang muncul antara lain adalah (i) perbandingan pembangunan regional (ii) disparitas pembangunan, dan (iii) ketimpangan pembangunan. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, pada dasarnya berbagai studi tersebut tujuannya sama yaitu melihat perbedaan antar daerah serta melakukan pemeringkatan antar daerah untuk melihat kemajuan suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya.

Usaha-usaha untuk mengukur kemajuan pembangunan telah dilakukan dalam beberapa dekade. Usaha-usaha tersebut khususnya ditekankan pada bagaimana mengukur kemajuan pembangunan di bidang sosial dengan fokus perhatian pada pemilihan sejumlah indikator yang dinilai representatif untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial. Usaha tersebut diawali oleh badan dunia melalui publikasi yang berjudul "*United Nations' Report on International Definition of Standard and Levels of*

*Living*” yang dipublikasikan pada tahun 1954 yang kemudian direvisi pada tahun 1961 melalui publikasi berjudul “*United Nations’ International Socio-economic Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide*” (lihat Ray 2008). Usaha-usaha untuk mengukur pembangunan di bidang sosial terus dikembangkan. Chakravarty (1976) mencoba membuat sebuah kerangka fikir (*framework*) yang mengintegrasikan sejumlah indikator sosial dan demografi dengan memasukkan sejumlah indikator statistik termasuk pendidikan, kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, perumahan, distribusi pendapatan, konsumsi dan indikator lain yang relevan untuk mengukur tingkat pembangunan di negara-negara berkembang.

Selanjutnya Ganguli dan Gupta (1976) mencoba mengukur standar hidup dengan mengajukan Indeks Tingkat Standar Hidup berupa indeks komposit yang disusun berdasarkan tiga indikator: (1) kalori per kapita, (2) konsumsi protein, dan (3) persentase pengeluaran makanan non-sereal terhadap total pengeluaran makanan. Usaha pengukuran kualitas hidup dikembangkan lebih lanjut oleh Morris (1979) yang mencoba membangun Indeks Kualitas Hidup secara Fisik (*Physical Quality Live Index/PQLI*) yang didasarkan pada tiga indikator utama yaitu (1) angka melek huruf, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka harapan hidup saat lahir.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian verifikatif yang bertujuan untuk mengkaji teori-teori ekonomi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menyusun hubungan antar variabel.

### **Daerah/Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di seluruh daerah kabupaten/kota provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pertimbangan bahwa anggaran pembangunan pemerintah pada setiap daerah kabupaten/kota memiliki besaran yang berbeda-beda dan tingkat prioritas kebijakan pembangunan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula (heterogen).

### **Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyusun matrik variabel-variabel yang diperlukan sesuai dengan model analisis. Pengumpulan data akan dilakukan dari berbagai sumber untuk dapat saling melengkapi kekurangan satu dengan lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan.

### **Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* dan data *cross-section* antar kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang diperlukan meliputi : data-data PDRB seluruh kabupaten/kota berdasarkan harga konstan, pengeluaran pemerintah daerah (atas beban APBD) sektor kesehatan dan pendidikan, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, investasi swasta.

Sumber data yang akan digunakan dalam kajian indek pembangunan daerah dimensi infrastruktur dan pelayanan publik adalah data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) baik hasil sensus maupun survei, sedangkan data lain diperoleh dari beberapa SKPD di daerah seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, dan Bank Indonesia. Data-data yang dikumpulkan dari BPS merupakan data hasil pengolahan maupun dikutip dari berbagai publikasi. Demikian halnya dengan data yang diperoleh dari instansi lain dikutip dari berbagai publikasi, baik elektronik maupun cetak.

### **Data dan Indikator Penelitian**

Untuk kebutuhan analisis maka terdapat sejumlah indikator terukur yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan secara umum. Khusus pada dimensi infrastruktur dan pelayanan publik pengukuran diwujudkan dalam 3 (tiga) kelompok sub dimensi, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Berikut rincian indikator yang terdapat dalam setiap sub dimensi sebagai berikut :

#### **Rincian Indikator Kelompok Dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik**

Pendidikan	Rasio murid SD/Sederajat terhadap kelas SD Satuan murid/kelas Sumber: Data SD dari MI	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana pendidikan yang memadai dalam proses belajar-mengajar di tingkat SD/MI sebagai upaya untuk meningkatkan penyerapan materi pembelajaran secara optimal
	Rasio murid SMP/Sederajat terhadap kelas SMP Satuan : murid/kelas Sumber: Data SMP dari Kemendiknas dan data MTs dari Kemenag	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana pendidikan yang memadai dalam proses belajar- mengajar di tingkat SMP/MTs sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan penyerapan materi pembelajaran secara



		optimal
	Rasio murid SMA/Sederajat terhadap kelas SMA Satuan : murid/kelas Sumber: Data SMA dan SMK dari Kemendiknas dan data MA dari Kemenag	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana pendidikan yang memadai dalam proses belajar- mengajar di tingkat SMA/SMK/MA sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan penyerapan materi secara optimal
Kesehatan	Rasio tempat tidur Rumahsakit terhadap penduduk Satuan :Unit/100.000 pddk Sumber: Diolah dari data jumlah tempat tidur RS- Kemenkes dan jumlah penduduk- BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana kesehatan untuk rawat jalan yang memadai sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan penduduk
	Rasio tempat tidur Rumahsakit terhadap penduduk Satuan :Unit/100.000 pddk Sumber: Diolah dari data jumlah tempat tidur RS- Kemenkes dan jumlah penduduk- BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan yang memadai sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan penduduk
	Rasio dokter terhadap penduduk Satuan :Orang/100.000 pddk Sumber: Diolah dari hasil PODES-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sumber daya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduknya
	Balita dengan kelahiran terakhir ditolong tenaga medis Satuan : persen Sumber: Diolah dari Susenas KOR-BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan tenaga medis yang mampu diakses oleh masyarakat luas sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi
	Penduduk yg berobat ke RS dan Dokter Satuan : persen Sumber: BPS	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk
Infrastruktur/ Pelayanan Publik Lainnya	Rumahtangga dengan sumber penerangan listrik Satuan : persen Sumber: Diolah dari Data BPS	Indikator ini untuk menunjukkan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana penerangan sebagai upaya untuk meningkatkan akses penduduk terhadap media dan membantu penduduk melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah
	Rasio kantor bank per kecamatan Satuan : unit/kecamatan Sumber: Diolah dari data jumlah Bank-BI	Indikator ini untuk menunjukkan penyediaan sarana lalu lintas keuangan sebagai upaya untuk mempermudah transaksi penduduk
	Luas lahan sawah beririgasi Satuan : persen Sumber: Statistik Tanaman Pangan- BPS	Indikator ni untuk menunjukkan penyediaan sarana pertanian guna membantu proses produksi pertanian tanaman pangan sebagai komoditas konsumsi utama penduduk

	Panjang jalan diaspal Satuan: persen Sumber: Perhubungan-BPS	Indikator ni untuk menunjukkan penyediaan sarana lalu lintas penduduk sebagai upaya untuk meningkatkan mobilitas
--	--	--

### **Prosedur Analisis**

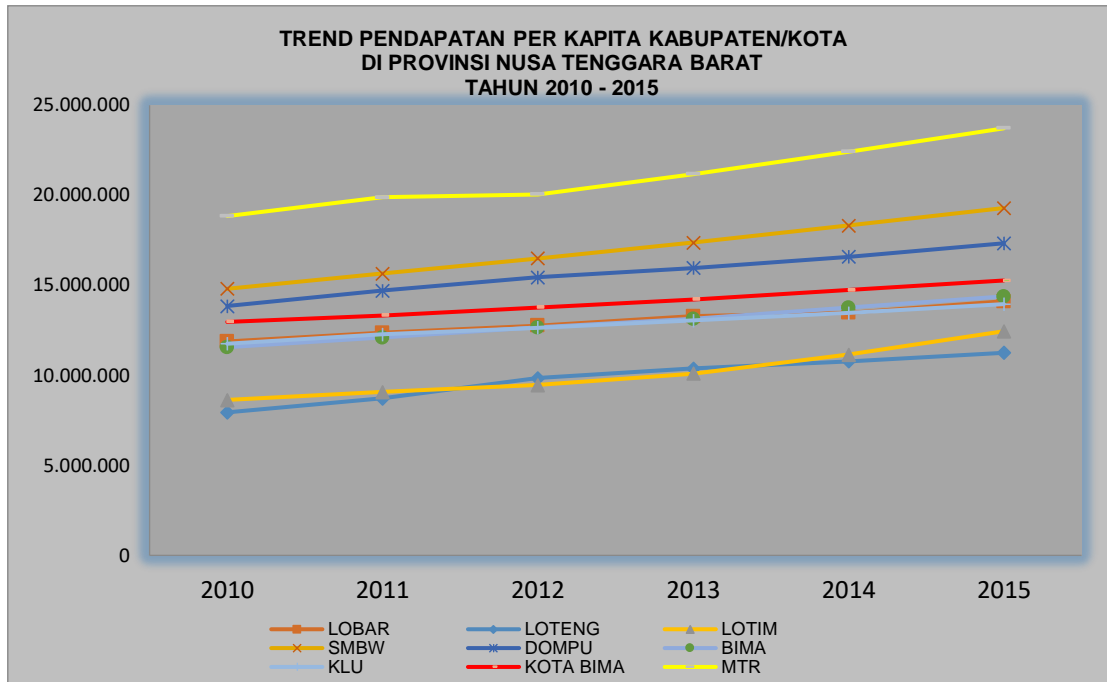
Merujuk pada pengukuran kinerja pembangunan yang dilakukan oleh badan Pusat Statistik (BPS) yaitu dengan menghitung indeks pembangunan regional (IPR) yang identik dengan indek pembangunan wilayah/daerah. Dalam penelitian ini indeks pembangunan regional (IPR) khusus dimensi Infrastruktur dan Pelayanan Publik dideskripsikan berdasarkan data tabulasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pendapatan Perkapita.**

Dinamika perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat sangat bervariasi, selain dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya alam (*faktor endowment*) juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur di daerah dan kebijakan pemerintah. Daerah-daerah yang memiliki infrastruktur relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain akan cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan proses transformasi sebagai hasil pembangunan nasional ataupun regional.

Dalam perspektif makro, Pendapatan per kapita atau disebut juga PDRB perkapita dijadikan sebagai tolok ukur kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita penduduk suatu daerah maka daya beli masyarakat akan semakin naik dan kesejahteraan masyarakat berpotensi semakin baik. Pendapatan per kapita di setiap daerah akan terus meningkat sepanjang pertumbuhan PDRB (aktivitas perekonomian daerah) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk daerah tersebut. Besarnya pendapatan per kapita di setiap kabupaten/kota selama periode penelitian dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Trend Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota  
Tahun 2010-2015**

Sumber : Data BPS diolah.

Pada grafik di atas ditunjukkan bahwa kecenderungan setiap daerah kabupaten/kota memiliki trend perkembangan pendapatan per kapita setiap tahunnya. Kabupaten Sumbawa Barat secara ekonomi memiliki keunggulan dibidang pertambangan non migas sebagai basis ekonominya. Sementara kota Mataram selain sebagai ibu kota provinsi yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan juga merupakan pusat kegiatan perekonomian dimana lebih dari setengah dari jumlah uang yang beredar berada di Nusa Tenggara Barat berada di kota Mataram.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa besarnya pendapatan per kapita setiap daerah memiliki varian yang cukup besar. Dalam kurun waktu penelitian daerah dengan tingkat PDRB per kapita tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian diikuti Kota Mataram. Sepanjang periode penelitian beberapa daerah yang memiliki pendapatan per kapita paling rendah adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah.

Indikator kesejahteraan dalam hal ini dilihat dari persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan dan non makanan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan

bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah Penduduk miskin di Provinsi NTB dalam kurun waktu 2011 - 2016 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin hampir mencapai 19,73% dari jumlah penduduk di tahun 2011. Keadaan tahun 2012, persentase penduduk miskin berkurang sekitar 1(satu) persen dibandingkan tahun sebelumnya dan berkurang lagi menjadi 17,97% dan 17,24% keadaan tahun 2013 dan 2014 serta 16,59% di tahun 2015. Untuk tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB mencapai 786.580 jiwa atau 16,07%, menurun 0.52% dibandingkan tahun 2015

### **Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pendidikan dapat dilihat dari kemampuan baca tulis (melek huruf) dan rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi tingkat melek huruf penduduk suatu daerah, maka semakin berhasil pembangunan pendidikan di daerah tersebut. Angka melek huruf pada kelompok umur 10 tahun keatas di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 mencapai sekitar 88,68%. Jika dirinci menurut komposisi jenis kelamin, kemampuan baca tulis penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Kemampuan baca tulis laki-laki sekitar 92,32%, sedangkan perempuan adalah 85,35%. Dengan kata lain, perempuan yang buta huruf lebih banyak dibandingkan laki-laki.

**Tabel : Angka Melek Huruf di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional Tahun 2009 - 2016.**

Provinsi	Tahun							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
NTB	80.18	81.05	83.24	83.68	87.19	88.64	88.66	88.68
Nasional	92.58	92.91	92.99	93.25	93.92	95.12	95.12	95.81

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

Data di atas memperlihatkan bahwa angka melek huruf dari tahun ke tahun terus meningkat. Angka Melek Huruf di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih rendah dari pada rata-rata nasional artinya penduduk yang buta huruf di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih lebih tinggi dari pada rata-rata nasional.

Indikator pendidikan yang lain adalah Rata-Rata Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Berikut disajikan tabel rata-rata lama sekolah di Provinsi NTB tahun 2011-2016.

**Tabel : Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016.**

	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-Rata Lama Sekolah	6.07	6.33	6.54	6.67	6.71	6.79

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

Data di atas memperlihatkan bahwa rata-rata lama sekolah sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Beberapa riset menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif terhadap kemampuan masyarakat menyerap dan menerima informasi, yang selanjutnya akan memacu kesadaran masyarakat.

Kesejahteraan Sosial dalam hal ini dilihat dari persentase penduduk miskin dan pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan dan non makanan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah Penduduk miskin di Provinsi NTB dalam kurun waktu 2011 - 2016 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin hampir mencapai 19,73% dari jumlah penduduk di tahun 2011. Keadaan tahun 2012, persentase penduduk miskin berkurang sekitar 1(satu) persen dibandingkan tahun sebelumnya dan berkurang lagi menjadi 17,97% dan 17,24% keadaan tahun 2013 dan 2014 serta 16,59% di tahun 2015. Untuk tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB mencapai 786.580 jiwa atau 16,07%, menurun 0.52% dibandingkan tahun 2015

## **Bidang Kesehatan**

Tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut dilaksanakan melalui program pembangunan kesehatan, seperti Pelayanan Kesehatan Ibu. Upaya-upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin dalam kandungan hingga kelahiran, masa nifas dan masa pertumbuhan bayi dan anaknya antara lain melalui peningkatan pelayanan antenatal sesuai standar bagi seluruh ibu hamil di semua fasilitas kesehatan dan peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten yang diarahkan ke fasilitas kesehatan.

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yakni lingkungan, perilaku, keturunan dan pelayanan kesehatan. Indikator utama derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat antara lain dari angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. Pada bagian ini, derajat kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat digambarkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian Ibu (AKI), angka morbiditas beberapa penyakit dan status gizi.

### ***Angka Harapan Hidup (AHH)***

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan. Kemiskinan akan menurunkan daya beli masyarakat, sebaliknya pada masyarakat yang berada diatas garis kemiskinan, daya belinya cenderung lebih tinggi sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi; mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Data Angka Harapan Hidup setiap tahun dirilis BPS yang diperoleh melalui survei. Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh kasus atau angka kematian bayi. Apabila melihat trend angka kematian bayi yang cenderung menurun, maka diperkirakan AHH NTB akan mengalami peningkatan. Bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2011 diperkirakan mempunyai

usia harapan hidup 62,41 tahun, dan bayi yang dilahirkan tahun 2012 usia harapan hidupnya mencapai 62,73 tahun. Tahun 2013 Usia Harapan Hidup NTB sebesar 64.7 tahun (dengan metode perhitungan baru BPS) mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 64,9 tahun atau meningkat sebesar 0,2 tahun dan kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 65,38 tahun atau meningkat sebesar 0,48 tahun. Kemudian pada tahun 2016 Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 65,48 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup tersebut sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

**Tabel : Jumlah Kematian Bayi di Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2016.**

Provinsi	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
NTB	62.41	62.73	64.7	64.9	65.38	65.48
Nasional	69.65	69.87	70.07	70.59	73,59	70,18

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

Dari data di atas terlihat bahwa setiap tahun AHH di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan, akan tetapi masih dibawah AHH nasional. Angka kematian bayi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi AHH di Nusa Tenggara Barat. Peningkatan AHH menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Angka Kematian**

Indikator keberhasilan pelayanan dan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari kejadian kematian masyarakat dari waktu ke waktu. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dikaitkan dengan tingkat kasus kematian bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas).

Menurut World Health Organisation (WHO) kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah persalinan atau berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Berdasarkan SDKI 2012 angka kematian ibu secara nasional sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012 mencapai 251 per 100.000 kelahiran hidup.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang tersedia hasil perhitungan indikator kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat melalui model pengukuran indeks pembangunan daerah, bahwa Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian.

## **SARAN**

Saran atau rekomendasi kebijakan yang diajukan berdasarkan pada kesimpulan dan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya sebagai berikut: Kebijakan pembangunan daerah lebih diarahkan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian dan memacu pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian kebijakan strategis. Ketersediaan infrastruktur di daerah sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah Nusa Tenggara Barat. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, pemerintah harus tetap memberikan prioritas pada penyediaan berbagai infrastruktur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afonso, Antonio, L. Schuknecht and V. Tanzi (2005). “*Public Sector Efficiency: An International Comparison*”, *Public Choice*, 123 (3-4), 321 – 47
- Bird, R. and Rodriguez, E. R.. 1999. *Decentralization and poverty alleviation. International experience and the case of the Philippines. Public Admin. Dev.*, 19: 299–319.
- Ghalib, Rusli, 2005, *Ekonomi Regional*
- Guritno Mangkusubroto. 1998. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta BPFE – UGM.
- Hakimudin, Dimas Rizal, 2010, *Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2007*.
- Juanita. 2002. *Kesehatan dan Pembangunan Nasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara



- Kurnia, Akhmad Syakir, 2010. Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH), *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.11, No.1:1-20.
- Kuznet S. 1955. Economic growth and income inequality. *The American Economic Review* 45: 1-28
- Lucas R.E. 1988. On The Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, Vol. 22(1):3-42.
- Mankiw, Gregory., 2007. Makroekonomi Edisi Keenam. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore, Mc. Graw-Hill Book Co.
- OECD, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide.
- Stiglitz, Joseph E. 2003. *Economics of the Public Sector*, Third Edition, Norton McGraw-Hill.
- UN, 2007, Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies.
- Von Braun, J. and U. Grote. 2002. *Does Decentralization Serve the Poor? In Managing Fiscal Decentralization ed. E. Ahmad, and V. Tanzi*. London and New York: Routledge.